Dari Elite Kolonial ke Politik Republik: Transformasi Kekuasaan Priyayi-Aristokrat dalam Struktur Politik Lokal Jawa Timur Tahun 1950–1963

Fathu Shodiqur Rohman[1], Soelistijanto[2], Agung Wibowo[3], Mahmud[4]
[1 2 3] *Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Ivet, Indonesia*
[4] *Pendidikan Sejarah, Fisipol, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia*
Corresponding author: fathushodiqurrohman@ivet.ac.id

Abstract

Transisi dari pemerintahan kolonial menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta-merta menghapus struktur kekuasaan yang telah terbentuk pada masa kolonial. Di Jawa Timur, keberadaan karesidenan dan kawedanan serta posisi strategis elite priyayi-aristokrat menunjukkan adanya kontinuitas struktur politik dan birokrasi dalam periode awal Republik. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kekuasaan priyayi-aristokrat dalam struktur politik lokal Jawa Timur pada periode 1950–1963 dan menginterpretasikannya sebagai bagian dari proses dekolonisasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik dan sejarah lokal dengan menempatkan elite priyayi-aristokrat sebagai aktor yang mengalami, merespons, dan beradaptasi terhadap perubahan struktur politik. Analisis difokuskan pada perubahan kelembagaan pemerintahan, posisi birokrasi lokal, sumber legitimasi politik, serta relasi antara elite lama dan munculnya aktor politik baru. Sumber penelitian mencakup arsip pemerintahan, peraturan perundang-undangan, surat kabar sezaman, dokumen politik, dan sumber sejarah lokal. Penelitian ini berargumen bahwa transisi menuju pemerintahan Republik tidak menghasilkan pemutusan langsung terhadap kekuasaan priyayi-aristokrat. Sebaliknya, periode 1950–1963 merupakan proses negosiasi dan transformasi, ketika sebagian elite mengalami penurunan posisi dan legitimasi, sementara sebagian lainnya beradaptasi dengan struktur birokrasi dan politik Republik. Restrukturisasi pemerintahan serta penghapusan karesidenan dan kawedanan pada 1963 secara bertahap mengubah basis kelembagaan kekuasaan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa dekolonisasi tidak hanya merupakan proses pengalihan kedaulatan, tetapi juga transformasi terhadap struktur, institusi, dan relasi kekuasaan yang diwariskan kolonialisme. Dengan demikian, sejarah politik lokal Jawa Timur dapat menjadi ruang penting untuk mendekolonisasi historiografi Indonesia dan menghadirkan perspektif lokal dalam memahami pembentukan politik Republik.

Keywords: priyayi-aristokrat, politik lokal, Jawa Timur, transformasi kekuasaan, dekolonisasi, karesidenan, kawedanan.

INTRODUCTION

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan Pengakuan kedaulatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 menandai perubahan mendasar dalam sejarah politik Indonesia. Berakhirnya kekuasaan kolonial dan lahirnya Republik Indonesia secara normatif menunjukkan adanya peralihan kedaulatan dari pemerintahan kolonial menuju pemerintahan nasional. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh struktur kelembagaan, pola

administrasi, maupun relasi sosial-politik yang telah terbentuk selama masa kolonial (Visser & Marey, 2008).

Negara Republik yang baru berdiri harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian besar perangkat pemerintahan di tingkat lokal masih menggunakan warisan administratif kolonial, sementara para pejabat dan elite yang telah lama menempati posisi strategis dalam birokrasi tetap memiliki pengalaman, jaringan sosial, serta modal politik yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan tatanan politik baru. Dengan demikian, proses pembentukan negara Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai pergantian kekuasaan dari kolonialisme kepada pemerintahan nasional, tetapi juga sebagai proses transformasi terhadap struktur kekuasaan yang telah mengakar dalam masyarakat (Visser & Marey, 2008) .

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dilihat dari perspektif sejarah lokal. Pembentukan Republik Indonesia berlangsung dalam kondisi geografis, sosial, dan politik yang sangat beragam. Perubahan politik di tingkat nasional tidak selalu menghasilkan perubahan yang seragam di tingkat daerah. Di satu sisi, pemerintah Republik berusaha membangun sistem pemerintahan yang lebih nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap struktur kolonial (van Bemmelen & Raben, 2011) . Di sisi lain, pemerintah daerah harus tetap menjalankan fungsi administrasi dengan menggunakan perangkat dan sumber daya manusia yang sebagian besar merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Situasi tersebut melahirkan proses negosiasi antara struktur lama dan struktur baru. Dalam konteks inilah keberadaan elite priyayi-aristokrat menjadi penting untuk dikaji karena kelompok tersebut merupakan salah satu aktor utama yang secara historis memiliki hubungan erat dengan birokrasi pemerintahan, struktur sosial lokal, dan kekuasaan politik di berbagai wilayah Jawa (Elson, 2007).

Istilah priyayi dalam sejarah Indonesia tidak hanya merujuk pada kelompok bangsawan dalam pengertian genealogis, tetapi juga berkaitan dengan kelompok elite birokrasi yang memperoleh kedudukan sosial melalui jabatan pemerintahan, pendidikan, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan(Geertz, 2014). Sementara itu, aristokrasi lokal memiliki basis legitimasi yang lebih kuat pada keturunan, hubungan genealogis dengan keluarga penguasa tradisional, serta kedudukan sosial yang diwariskan. Dalam praktiknya, kedua kelompok tersebut sering kali memiliki ruang sosial dan politik yang

beririsan. Mereka dapat menempati posisi birokratis, memiliki akses terhadap sumber daya pemerintahan, sekaligus memperoleh pengaruh melalui jaringan keluarga dan patronase (Geertz, 2014). Pada masa kolonial, keberadaan elite lokal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan tidak langsung dan administrasi daerah. Karena itu, ketika Republik Indonesia berdiri, persoalan yang muncul bukan semata-mata apakah elite lama masih ada, melainkan bagaimana posisi, kewenangan, dan legitimasi mereka mengalami perubahan dalam struktur politik yang baru. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang penting untuk memahami persoalan tersebut. Wilayah ini memiliki sejarah pemerintahan dan struktur sosial yang kompleks, dengan keberadaan pusat-pusat kekuasaan tradisional, birokrasi kolonial, serta jaringan elite lokal yang berkembang dalam waktu panjang (Ham, 2018). Pada masa kolonial, pembagian wilayah administratif seperti karesidenan dan kawedanan menjadi bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan. Karesidenan berfungsi sebagai salah satu jenjang administratif yang menghubungkan pemerintahan pusat dengan wilayah yang lebih kecil, sedangkan kawedanan menjadi bagian dari mekanisme pengendalian administratif di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Struktur tersebut bukan sekadar pembagian wilayah secara geografis, tetapi juga merupakan ruang tempat berlangsungnya praktik birokrasi, distribusi kewenangan, serta pembentukan hubungan antara pejabat pemerintah dan masyarakat lokal (Ham, 2018).

Dalam perspektif tersebut, elite priyayi-aristokrat dapat ditempatkan sebagai aktor yang mengalami sekaligus merespons proses dekolonisasi. Mereka tidak selalu menjadi kelompok yang secara pasif kehilangan kekuasaan setelah kemerdekaan. Sebagian elite mengalami penurunan kedudukan akibat perubahan sistem pemerintahan dan munculnya prinsip-prinsip politik baru yang menekankan nasionalisme, representasi politik, serta kesetaraan kewarganegaraan. Akan tetapi, sebagian elite lainnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Pengalaman birokratis, tingkat pendidikan, jaringan sosial, serta pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan memungkinkan mereka memasuki atau mempertahankan posisi dalam birokrasi Republik misalnya Sultan Hamangkubuwono IX. Yang berhasil mempertahankan posisinya dan bisa beradaptasi pada momentum revolusi sosial.

Dengan demikian, transformasi elite tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai proses pergantian antara elite lama dan elite baru. Transformasi tersebut juga mencakup perubahan strategi, sumber legitimasi, dan cara elite lama menyesuaikan diri dengan struktur politik yang sedang berkembang.

LITERATURE REVIEW

Kajian tentang Dekolonisasi dan Pembentukan Negara Indonesia

Kajian mengenai dekolonisasi Indonesia selama ini banyak ditempatkan dalam konteks berakhirnya kekuasaan kolonial dan terbentuknya negara nasional. Dalam perspektif tersebut, kemerdekaan dipahami sebagai titik balik yang mengubah sumber kedaulatan dari pemerintahan kolonial menuju negara Republik Indonesia. Akan tetapi, perkembangan historiografi pascakolonial menunjukkan bahwa dekolonisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pengalihan kedaulatan. Dekolonisasi juga merupakan proses restrukturisasi institusi, birokrasi, identitas politik, serta hubungan antara negara dan masyarakat (Riyanto, 2025) .

Perspektif tersebut penting karena struktur pemerintahan kolonial memiliki tingkat keberlanjutan yang cukup kuat setelah kemerdekaan. Negara baru tidak dapat secara langsung menghapus seluruh perangkat administrasi kolonial karena membutuhkan institusi yang mampu menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, pembentukan negara Republik berlangsung melalui hubungan yang kompleks antara kontinuitas dan perubahan. Institusi lama dapat dipertahankan, tetapi fungsi dan orientasinya berubah. Pejabat lama dapat tetap bekerja, tetapi mereka harus menyesuaikan diri dengan legitimasi negara nasional.

Dalam konteks ini, dekolonisasi dapat dipahami sebagai proses yang bersifat gradual dan tidak linear. Kemerdekaan menjadi awal perubahan, bukan akhir dari proses dekolonisasi. Perubahan struktur administratif, penggantian elite, nasionalisasi birokrasi, serta perubahan sumber legitimasi politik merupakan bagian dari proses yang berlangsung setelah kemerdekaan. Perspektif semacam ini membuka ruang bagi penelitian yang tidak hanya melihat hubungan Indonesia dengan kekuasaan kolonial, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat dan elite lokal mengalami serta merespons perubahan tersebut.

Bagi penelitian mengenai Jawa Timur, pendekatan ini menjadi penting karena struktur pemerintahan daerah pada periode awal Republik masih memperlihatkan sejumlah unsur yang berasal dari masa kolonial. Keberadaan karesidenan dan kawedanan menunjukkan bahwa perubahan politik tidak berlangsung melalui pemutusan administratif secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan dekolonisasi sebagai proses transformasi kekuasaan yang berlangsung secara bertahap melalui perubahan kelembagaan, birokrasi, legitimasi, dan jaringan elite.

Priyayi sebagai Elite Birokrasi dan Sosial dalam Sejarah Jawa

Kajian mengenai priyayi merupakan salah satu bagian penting dalam historiografi sosial dan politik Jawa. Konsep priyayi umumnya digunakan untuk menjelaskan kelompok elite yang memiliki kedudukan sosial dan administratif dalam masyarakat Jawa. Dalam perkembangan sejarahnya, priyayi tidak hanya berkaitan dengan keturunan bangsawan, tetapi juga dengan jabatan birokrasi, pendidikan, dan kedekatan dengan pusat pemerintahan (Arimi, 2008).

Dalam struktur pemerintahan kolonial, kelompok priyayi memperoleh posisi strategis karena mereka memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dengan masyarakat lokal. Penguasaan terhadap administrasi, pengetahuan mengenai tata pemerintahan, serta jaringan sosial membuat kelompok ini memiliki kedudukan penting dalam struktur politik daerah. Posisi tersebut pada akhirnya menghasilkan hubungan yang kompleks antara status sosial tradisional dan birokrasi modern (Arimi, 2008).

Kajian mengenai priyayi juga memperlihatkan bahwa kelompok tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang homogen. Di dalamnya terdapat perbedaan berdasarkan asal-usul keluarga, jabatan, pendidikan, wilayah, serta hubungan dengan pemerintah. Karena itu, ketika terjadi perubahan politik setelah kemerdekaan, respons priyayi terhadap Republik juga tidak seragam.

Sebagian dapat mempertahankan posisi melalui birokrasi, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan status akibat perubahan struktur pemerintahan. Ada pula kemungkinan bahwa elite lama mengubah sumber legitimasi mereka dengan memasuki organisasi politik atau menggunakan jaringan sosial yang telah dimiliki. Bagi penelitian ini, kajian tentang priyayi memberikan dasar untuk memahami bagaimana status sosial,

jabatan birokrasi, pendidikan, dan jaringan sosial dapat berfungsi sebagai modal kekuasaan. Dengan demikian, transformasi priyayi-aristokrat tidak hanya dianalisis melalui perubahan jabatan formal, tetapi juga melalui perubahan sumber legitimasi dan strategi mempertahankan pengaruh.

Elite Lama dan Munculnya Aktor Politik Baru

Salah satu tema penting dalam literatur politik Indonesia pascakemerdekaan adalah munculnya aktor politik baru. Kemerdekaan membuka ruang yang lebih besar bagi partai politik, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, kaum terpelajar, dan kelompok sosial lainnya. Perkembangan ini mengubah konfigurasi politik lokal. Jika kekuasaan sebelumnya banyak bertumpu pada status administratif dan sosial, maka dalam sistem politik Republik legitimasi semakin terkait dengan partisipasi dan representasi politik. Perubahan ini menghasilkan kompetisi antara elite birokratis-tradisional dan aktor politik baru (H. Poeze & Nordholt, 2023).

Literatur mengenai elite dan politik lokal menunjukkan bahwa hubungan antara elite lama dan aktor baru tidak selalu berupa konflik. Keduanya dapat membangun hubungan kerja sama. Elite lama memiliki pengalaman administratif dan jaringan sosial, sedangkan aktor baru memiliki akses terhadap organisasi politik dan mobilisasi masyarakat. Interaksi tersebut dapat menghasilkan bentuk baru elite politik yang menggabungkan karakter birokratis, aristokratik, dan politik modern. Perspektif ini penting bagi penelitian karena mencegah penggunaan dikotomi yang terlalu sederhana antara “elite lama” dan “elite baru”. Transformasi politik lebih tepat dipahami sebagai proses rekombinasi elite. Sebagian aktor lama masuk ke dalam sistem baru, sementara sebagian aktor baru memperoleh posisi dalam struktur pemerintahan.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah politik dan sejarah lokal untuk menganalisis transformasi kekuasaan priyayi-aristokrat dalam struktur politik lokal Jawa Timur pada periode 1950–1963. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pentingnya fase konsolidasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1950 hingga restrukturisasi pemerintahan daerah yang ditandai dengan penghapusan karesidenan dan kawedanan pada 1963. Penelitian dilakukan melalui empat tahapan

metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian meliputi arsip pemerintahan, peraturan perundang-undangan, surat kabar sezaman, dokumen politik, serta berbagai sumber sejarah lokal dan literatur akademik yang relevan. Kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian, kredibilitas, dan relevansi sumber, sedangkan triangulasi digunakan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber agar diperoleh rekonstruksi sejarah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis penelitian difokuskan pada empat aspek, yaitu perubahan kelembagaan pemerintahan, posisi priyayi-aristokrat dalam birokrasi lokal, perubahan sumber legitimasi politik, serta hubungan antara elite lama dan munculnya aktor politik baru. Data yang telah diverifikasi kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan konsep dekolonisasi sebagai proses transformasi struktur, institusi, dan relasi kekuasaan yang diwariskan kolonialisme. Dalam kerangka ini, keberlanjutan karesidenan, kawedanan, dan keterlibatan elite lama dalam birokrasi Republik tidak dipandang sebagai kontinuitas kolonial semata, tetapi sebagai bagian dari proses negosiasi dan adaptasi menuju struktur politik nasional. Penelitian selanjutnya disajikan secara analitis-kronologis untuk menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan priyayi-aristokrat berlangsung secara bertahap melalui proses pelemahan, adaptasi, dan transformasi sumber legitimasi dalam pembentukan politik Republik di Jawa Timur.

RESULTS AND DISCUSSION

Perubahan struktur politik pada periode 1950–1963 memberikan ruang yang penting untuk mengamati proses tersebut. Tahun 1950 dapat dipandang sebagai titik awal yang relevan karena pada periode tersebut struktur ketatanegaraan Indonesia memasuki fase baru setelah berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan kembali terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Selanjutnya, dekade 1950-an merupakan periode yang penuh dinamika politik, ditandai oleh perubahan sistem pemerintahan, perkembangan partai politik, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, serta munculnya aktor-aktor politik baru di tingkat lokal. Perubahan tersebut secara bertahap memengaruhi posisi elite birokrasi dan

aristokrasi yang sebelumnya memperoleh legitimasi terutama dari jabatan, keturunan, dan hubungan dengan struktur pemerintahan kolonial (Ibrahim, 2018) .

Pada saat yang sama, munculnya aktor politik baru mengubah arena kekuasaan lokal. Partai politik, organisasi kemasyarakatan keagamaan, kelompok pemuda, kaum terpelajar, kelompok kiri serta kelompok sosial lainnya semakin memiliki ruang dalam kehidupan politik Republik. Legitimasi politik tidak lagi hanya bersumber dari kedudukan administratif atau status sosial tradisional, tetapi juga dari kemampuan memperoleh dukungan masyarakat melalui organisasi dan mekanisme politik modern. Perubahan ini menciptakan kompetisi antara berbagai sumber legitimasi. Elite priyayi-aristokrat yang sebelumnya memiliki otoritas sosial dan administratif harus berhadapan dengan kelompok-kelompok baru yang menawarkan bentuk representasi politik yang berbeda. Dengan demikian, transformasi politik lokal tidak hanya terjadi pada tingkat kelembagaan, tetapi juga pada perubahan definisi mengenai siapa yang dianggap memiliki hak dan kapasitas untuk memegang kekuasaan (Sapto, 2012).

Jawa Timur menjadi ruang yang strategis untuk melihat proses tersebut karena perubahan politik nasional berinteraksi dengan karakter sosial dan sejarah lokal yang khas. Struktur elite di Jawa Timur tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui hubungan antara birokrasi, keluarga aristokrat, institusi tradisional, pendidikan, dan jaringan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kedudukan seorang elite tidak dapat semata-mata dilihat dari perubahan jabatan formalnya (Sapto, 2012). Penting pula untuk melihat bagaimana jaringan sosialnya bertahan, bagaimana ia memperoleh legitimasi baru, serta bagaimana hubungan antara elite lama dengan institusi politik baru berkembang. Pendekatan sejarah lokal memungkinkan dinamika semacam ini diamati secara lebih konkret dibandingkan apabila perubahan tersebut hanya dipahami melalui kebijakan pemerintah pusat.

Salah satu persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara perubahan kelembagaan dan perubahan kekuasaan. Struktur pemerintahan bukanlah sesuatu yang netral karena di dalamnya terdapat distribusi kewenangan dan sumber daya. Ketika struktur karesidenan dan kawedanan masih dipertahankan, maka sebagian pola hubungan kekuasaan yang berkaitan dengannya juga memiliki kemungkinan untuk bertahan. Sebaliknya, ketika struktur tersebut mulai dihapus atau direstrukturisasi, basis

kelembagaan yang menopang kekuasaan elite tertentu ikut mengalami perubahan. Karena itu, penghapusan karesidenan dan kawedanan pada 1963 (Perpres 22/1963) dapat dipahami bukan sekadar sebagai perubahan administratif, tetapi juga sebagai salah satu tahap dalam restrukturisasi politik lokal. Perubahan tersebut mempersempit atau mengubah ruang institusional yang sebelumnya memungkinkan elite tertentu mempertahankan pengaruhnya.

Kontinuitas Struktur Pemerintahan dan Warisan Kolonial di Jawa Timur

Proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kemerdekaan tidak berlangsung melalui penghapusan secara langsung terhadap seluruh struktur pemerintahan yang diwariskan oleh kolonialisme. Dalam praktiknya, negara baru membutuhkan perangkat administratif yang mampu menjamin keberlangsungan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah struktur pemerintahan yang telah terbentuk pada masa kolonial tetap memiliki fungsi dalam periode awal Republik. Di Jawa Timur, keberadaan karesidenan dan kawedanan menunjukkan bahwa proses perubahan politik berlangsung secara bertahap. Struktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya hubungan kekuasaan antara pemerintah, pejabat birokrasi, dan masyarakat.

Kontinuitas kelembagaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara perubahan politik secara formal dan perubahan kekuasaan secara substantif. Secara formal, Indonesia telah menjadi negara merdeka dan pemerintahan kolonial telah berakhir. Akan tetapi, perangkat pemerintahan yang digunakan untuk mengelola wilayah masih mengandung banyak unsur warisan kolonial. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kebutuhan negara baru untuk mempertahankan fungsi administratif di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan institusi. Pemerintah Republik tidak mungkin membangun seluruh perangkat pemerintahan dari awal dalam waktu singkat. Karena itu, struktur yang sudah tersedia tetap digunakan sambil secara bertahap disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan nasional (Kahin, 1952).

Dalam konteks ini, karesidenan dan kawedanan dapat dipahami sebagai institusi yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, keduanya merupakan perangkat administratif yang membantu negara menjalankan pemerintahan. Di sisi lain, struktur tersebut juga

menjadi tempat berlangsungnya reproduksi kekuasaan elite lokal. Jabatan administratif memberikan akses terhadap informasi, sumber daya negara, jaringan birokrasi, dan hubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan struktur administratif lama memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan posisi sosial kelompok yang sebelumnya memperoleh keuntungan dari struktur tersebut.

Kontinuitas ini tidak berarti bahwa pemerintahan Republik sekadar meneruskan sistem kolonial. Perubahan orientasi politik secara bertahap mengubah fungsi dan makna institusi tersebut. Dalam pemerintahan kolonial, birokrasi daerah merupakan bagian dari mekanisme pengendalian kolonial. Dalam negara Republik, struktur administratif tersebut ditempatkan dalam kerangka negara nasional (Setiyono & Triyana, 2014). Dengan demikian, terjadi proses transformasi fungsi tanpa selalu disertai perubahan kelembagaan secara langsung. Institusi lama memperoleh makna baru karena bekerja dalam konteks politik yang berbeda.

Hal ini penting karena menunjukkan bahwa dekolonisasi pada tingkat lokal tidak selalu berbentuk penghapusan institusi lama, tetapi dapat berlangsung melalui proses pengambilalihan, penyesuaian, dan reinterpretasi. Struktur yang sebelumnya berfungsi untuk menopang kekuasaan kolonial dapat digunakan oleh negara Republik untuk membangun pemerintahan nasional. Namun, penggunaan tersebut juga menciptakan ruang bagi berlangsungnya kontinuitas praktik birokrasi dan pola hubungan sosial yang telah berkembang sebelumnya.

Priyayi-Aristokrat sebagai Elite yang Mengalami Transformasi

Perubahan politik setelah kemerdekaan membawa dampak langsung terhadap posisi priyayi-aristokrat. Kelompok ini sebelumnya memperoleh status melalui kombinasi antara jabatan birokrasi, keturunan, pendidikan, dan kedekatan dengan struktur kekuasaan. Dalam negara Republik, sebagian sumber legitimasi tersebut mulai mengalami perubahan. Kedudukan sosial yang didasarkan pada keturunan tidak lagi secara otomatis memberikan kewenangan politik. Demikian pula jabatan administratif tidak lagi dipahami sebagai hak yang melekat pada kelompok elite tertentu, tetapi sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara yang dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan politik dan administratif (Toer et al., 1999).

Perubahan tersebut membuat posisi priyayi-aristokrat menjadi ambivalen. Mereka berada di antara dua dunia politik. Di satu sisi, mereka memiliki modal sosial dan birokratis yang berasal dari masa sebelumnya. Di sisi lain, mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem politik Republik yang semakin menekankan nasionalisme dan bentuk-bentuk legitimasi politik modern. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah keterlibatan sebagian priyayi-aristokrat dalam gerakan nasionalis dan partai politik, terutama Partai Nasional Indonesia (PNI). Bergabungnya sebagian elite ke dalam PNI menunjukkan bahwa jaringan dan pengalaman politik yang sebelumnya terbentuk dalam lingkungan birokrasi dapat dialihkan ke dalam arena politik Republik (Wardani, 2018).

Keterlibatan priyayi-aristokrat dalam nasionalisme juga tidak selalu berarti terputusnya hubungan mereka dengan identitas sosial sebelumnya. Sebaliknya, nasionalisme dapat menjadi sumber legitimasi baru yang memungkinkan mereka mempertahankan relevansi politik dalam negara yang sedang mengalami perubahan (Cahyaningtyas et al., 2020). Dengan menempatkan diri sebagai bagian dari gerakan nasional, sebagian elite lama dapat mengubah citra dari kelompok yang dekat dengan struktur kolonial menjadi kelompok yang memiliki peran dalam pembangunan negara Republik. Dalam konteks ini, nasionalisme menjadi salah satu ruang negosiasi antara identitas lama sebagai priyayi-aristokrat dan identitas baru sebagai warga negara serta elite politik Republik (MUKAROMAH, 2016).

Bergabungnya sebagian priyayi-aristokrat dengan PNI juga memperlihatkan adanya hubungan antara modal birokrasi, pendidikan, dan jaringan sosial dengan politik kepartaian. PNI menyediakan ruang politik baru bagi individu-individu yang memiliki pengalaman administratif, pendidikan, kemampuan organisasi, dan jaringan sosial. Bagi sebagian priyayi, keterlibatan dalam partai memungkinkan mereka mempertahankan pengaruh tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kedudukan aristokratik atau jabatan birokrasi. Mereka dapat menggunakan pengalaman dan jaringan yang telah dimiliki untuk membangun posisi baru sebagai kader, pengurus, atau tokoh politik.

Keterlibatan dalam PNI dan gerakan nasionalis bukanlah satu-satunya bentuk adaptasi politik. Sebagian elite tetap mempertahankan pengaruh melalui birokrasi, sementara sebagian lainnya membangun hubungan dengan organisasi sosial dan keagamaan. Dengan demikian, proses transformasi elite berlangsung melalui berbagai

jalur. Seorang priyayi dapat tetap berada dalam birokrasi, berpindah ke arena partai politik, atau menggabungkan pengalaman birokrasi dengan aktivitas politik. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa batas antara birokrat, priyayi, dan politisi pada masa awal Republik tidak selalu bersifat tegas (Compton, 2021).

Sebagian elite memang mengalami penurunan kedudukan. Perubahan struktur pemerintahan dapat menghilangkan jabatan yang sebelumnya menjadi sumber kekuasaan mereka. Ketika fungsi lembaga tertentu berkurang atau dihapus, posisi elite yang bergantung pada lembaga tersebut ikut mengalami pelemahan. Akan tetapi, sebagian lainnya memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi. Pengalaman dalam birokrasi menjadi modal penting untuk memasuki struktur pemerintahan Republik. Pendidikan dan kemampuan administratif juga memungkinkan mereka tetap memperoleh kepercayaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu, keterlibatan dalam gerakan nasionalis dan PNI memberikan alternatif bagi elite untuk memperoleh legitimasi melalui politik massa dan organisasi partai (Situngkir et al., 2024).

Dengan demikian, transformasi elite lebih tepat dipahami sebagai perubahan bentuk kekuasaan daripada sekadar pergantian personel. Elite lama dapat kehilangan satu sumber kekuasaan tetapi memperoleh sumber kekuasaan lainnya. Seorang pejabat yang sebelumnya memperoleh legitimasi dari status aristokratik, misalnya, dapat membangun legitimasi baru melalui jabatan pemerintahan Republik atau melalui keterlibatan dalam gerakan nasionalis dan partai politik. Dengan cara tersebut, identitas sosial lama tidak selalu hilang, tetapi dinegosiasikan dengan identitas baru sebagai birokrat, pejabat negara, aktivis nasionalis, atau politisi partai.

Proses adaptasi tersebut memperlihatkan bahwa elite merupakan aktor yang aktif dalam sejarah. Mereka tidak hanya menjadi objek perubahan kebijakan, tetapi juga berusaha merespons perubahan tersebut. Adaptasi dapat dilakukan melalui pendidikan, jaringan birokrasi, hubungan politik, maupun keterlibatan dalam organisasi dan partai politik. Pilihan untuk bergabung dengan gerakan nasionalis dan PNI dapat dipandang sebagai salah satu strategi untuk menyesuaikan modal sosial dan politik yang telah dimiliki dengan struktur kekuasaan Republik yang baru. Kemampuan beradaptasi inilah yang menjelaskan mengapa perubahan menuju negara Republik tidak menghasilkan

pemutusan total antara elite kolonial dan elite Republik, melainkan menghasilkan proses kesinambungan, negosiasi, dan transformasi di antara keduanya (Compton, 2021).

Munculnya Aktor Politik Baru dan Perubahan Konstelasi Lokal

Periode 1950–1963 juga ditandai oleh meningkatnya peran aktor politik baru. Perkembangan partai politik dan organisasi masyarakat mengubah struktur kekuasaan lokal. Jika sebelumnya arena politik sangat berkaitan dengan birokrasi dan struktur aristokratik, maka dalam negara Republik politik semakin terbuka terhadap kelompok yang memiliki kemampuan mobilisasi massa. Di Jawa Timur, perubahan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya partai politik, organisasi keagamaan, organisasi buruh dan tani, serta gerakan kiri yang berusaha membangun basis sosial dan politik di berbagai wilayah.

Organisasi keagamaan, terutama yang memiliki akar kuat di lingkungan masyarakat pedesaan dan perkotaan Jawa Timur, memainkan peran penting dalam membentuk ruang politik lokal. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi ruang mobilisasi sosial, pendidikan, pengorganisasian masyarakat, serta artikulasi kepentingan politik (Van Bruinessen, 1994) Jaringan pesantren, madrasah, masjid, ulama, tokoh agama, dan komunitas jamaah memberikan organisasi-organisasi tersebut basis sosial yang relatif kuat. Dengan demikian, legitimasi politik tidak lagi semata-mata diperoleh melalui kedudukan dalam birokrasi atau status aristokratik, tetapi juga melalui otoritas keagamaan dan kemampuan membangun loyalitas serta mobilisasi masyarakat.

Di sisi lain, berkembang pula pengaruh gerakan kiri yang berusaha mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan persoalan sosial dan ekonomi. Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi massa yang berada dalam orbit politik kiri, seperti organisasi buruh, tani, pemuda, dan perempuan, menjadi bagian penting dari dinamika politik Jawa Timur (Rivai & Sulistyo, 2000). Basis sosial gerakan kiri berkembang terutama melalui isu-isu yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, hubungan agraria, kondisi buruh, serta persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah. Melalui organisasi massa, gerakan kiri berusaha mengubah kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di luar struktur kekuasaan menjadi aktor politik yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan tuntutan dan melakukan mobilisasi.

Pertumbuhan gerakan kiri tersebut memiliki arti penting dalam perubahan politik lokal karena memperkenalkan bentuk legitimasi yang berbeda dari legitimasi aristokratik, birokratik, maupun keagamaan. Legitimasi politik dibangun melalui identitas kelas, solidaritas organisasi, pengalaman perjuangan, serta kemampuan mengorganisasi massa. Di wilayah pedesaan, isu agraria menjadi salah satu sarana penting dalam membangun dukungan. Sementara itu, di wilayah perkotaan dan pusat-pusat industri, organisasi buruh dapat menjadi basis mobilisasi politik. Dengan demikian, ruang politik lokal semakin dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pengambilan keputusan.

Perkembangan gerakan kiri juga memperlihatkan bahwa politik lokal Jawa Timur semakin dipengaruhi oleh kompetisi ideologis (Anderson, 2013). Persaingan tidak hanya terjadi antara elite lama dan elite baru, tetapi juga antara berbagai organisasi yang menawarkan gagasan berbeda mengenai negara, masyarakat, ekonomi, dan hubungan sosial. Partai dan organisasi keagamaan berhadapan dengan organisasi-organisasi kiri dalam memperebutkan pengaruh di tengah masyarakat. Dalam sejumlah konteks, persaingan tersebut berlangsung melalui perebutan dukungan masyarakat, penguasaan organisasi massa, kegiatan sosial, pendidikan, serta pembentukan jaringan politik di tingkat desa dan kota.

Situasi tersebut menjadikan masyarakat desa sebagai salah satu arena penting kontestasi politik. Desa tidak lagi semata-mata menjadi ruang administratif yang berada di bawah pengaruh birokrasi dan elite lokal, tetapi berkembang menjadi arena tempat berbagai organisasi berusaha membangun pengaruh. Elite birokrasi dan priyayi mempertahankan jaringan patronase, organisasi keagamaan mengandalkan hubungan ulama dan jamaah, sedangkan gerakan kiri membangun organisasi berbasis buruh dan tani. Pertemuan berbagai jaringan tersebut menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang lebih cair sekaligus lebih kompetitif.

Bagi priyayi-aristokrat, perkembangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul karena dominasi lama tidak dapat lagi dipertahankan hanya melalui status sosial. Kehadiran partai politik, organisasi keagamaan, dan gerakan kiri memperluas sumber kekuasaan di luar birokrasi dan struktur aristokratik. Namun, peluang juga muncul karena pengalaman dan jaringan yang dimiliki elite lama dapat

digunakan untuk memasuki arena politik baru. Sebagian elite dapat bekerja sama dengan partai atau organisasi tertentu, sementara yang lain mempertahankan pengaruh melalui birokrasi. Pada saat yang sama, tokoh agama dan pemimpin organisasi keagamaan dapat membangun hubungan dengan birokrasi dan elite lokal, sementara tokoh-tokoh gerakan kiri berusaha membangun basis politik melalui organisasi massa(H. A. Poeze, 2009).

Interaksi antara elite birokrasi, priyayi-aristokrat, partai politik, organisasi keagamaan, dan gerakan kiri menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang semakin kompleks. Tidak terdapat batas tegas antara elite lama dan elite baru. Dalam banyak kasus, seseorang dapat memiliki karakteristik keduanya: berasal dari lingkungan elite tradisional tetapi aktif dalam politik modern; memiliki pengalaman birokrasi tetapi juga terlibat dalam organisasi politik; atau berasal dari lingkungan keagamaan tetapi kemudian memasuki arena partai dan pemerintahan. Demikian pula, aktivis organisasi massa dapat berkembang menjadi tokoh politik yang memiliki pengaruh lebih luas. Karena itu, istilah "elite lama" dan "elite baru" sebaiknya dipahami sebagai kategori analitis, bukan sebagai kelompok yang sepenuhnya terpisah.

Keberadaan organisasi keagamaan dan gerakan kiri menunjukkan bahwa proses politisasi masyarakat Jawa Timur berlangsung melalui berbagai jaringan sosial. Organisasi keagamaan menyediakan basis mobilisasi yang bertumpu pada otoritas ulama, pesantren, pendidikan, dan komunitas jamaah, sedangkan gerakan kiri membangun mobilisasi melalui organisasi buruh, tani, pemuda, dan perempuan. Keduanya menunjukkan bahwa politik tidak lagi menjadi monopoli birokrasi dan elite tradisional. Masyarakat semakin menjadi bagian aktif dari proses politik, meskipun keterlibatan tersebut juga menghasilkan persaingan ideologis dan sosial yang semakin tajam (Gie, 2005).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dekolonisasi menghasilkan reorganisasi jaringan kekuasaan. Kekuasaan tidak menghilang, tetapi berpindah dan berubah bentuk. Jaringan sosial yang sebelumnya dibangun dalam struktur kolonial dapat digunakan dalam struktur Republik. Pada saat yang sama, jaringan baru yang dibentuk oleh partai, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan gerakan kiri mulai berkembang. Persinggungan antara jaringan birokrasi, aristokrasi, partai politik, organisasi keagamaan,

serta organisasi massa kiri menjadi salah satu karakter penting politik lokal Jawa Timur pada periode 1950–1963.

Dengan demikian, perubahan konstelasi politik Jawa Timur pada periode tersebut sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai pergantian elite kolonial dengan elite Republik. Perubahan tersebut merupakan proses reorganisasi kekuasaan yang melibatkan semakin banyak aktor dan jaringan sosial. Priyayi dan birokrat mempertahankan sebagian pengaruh melalui institusi negara, organisasi keagamaan membangun legitimasi melalui otoritas sosial dan keagamaan, sementara gerakan kiri berusaha memperoleh kekuasaan melalui mobilisasi kelompok buruh dan tani. Persaingan sekaligus pertemuan berbagai kekuatan tersebut membentuk lanskap politik lokal yang semakin plural, kompetitif, dan sarat dengan pertarungan legitimasi.

Implikasi terhadap Historiografi Politik Indonesia

Kajian mengenai priyayi-aristokrat di Jawa Timur memiliki implikasi lebih luas terhadap historiografi Indonesia. Sejarah pembentukan Republik sering kali disajikan melalui perspektif nasional yang menempatkan pemerintah pusat, tokoh nasional, dan peristiwa besar sebagai aktor utama. Perspektif tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana negara Republik dibangun di tingkat lokal.

Sejarah lokal memungkinkan proses tersebut dipahami dari perspektif yang berbeda. Negara tidak hanya dibentuk melalui keputusan politik di pusat, tetapi juga melalui interaksi dengan pejabat daerah, elite lokal, organisasi masyarakat, dan kelompok politik yang berkembang di berbagai wilayah (Abdullah, 2024). Dalam konteks Jawa Timur, proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan negara merupakan proses yang melibatkan negosiasi antara struktur lama dan aspirasi baru.

Perspektif lokal juga membantu menghindari pemahaman yang terlalu sederhana mengenai dekolonisasi. Jika dekolonisasi hanya dipahami sebagai berakhirnya pemerintahan kolonial, maka keberadaan struktur administratif dan elite lama setelah kemerdekaan akan terlihat sebagai anomali. Sebaliknya, jika dekolonisasi dipahami sebagai transformasi jangka panjang, kontinuitas tersebut menjadi bagian dari proses sejarah itu sendiri.

Dalam kerangka ini, priyayi-aristokrat bukan sekadar peninggalan masa kolonial yang kemudian hilang. Mereka merupakan aktor yang ikut mengalami pembentukan

Republik dan dalam beberapa kasus menjadi bagian dari proses tersebut. Ada yang mengalami pelemahan, ada yang melakukan adaptasi, dan ada yang mengubah bentuk pengaruhnya. Kompleksitas ini memperlihatkan bahwa perubahan politik tidak selalu berlangsung melalui penggantian total.

Perspektif tersebut juga memungkinkan historiografi Indonesia menjadi lebih sensitif terhadap pengalaman lokal. Jawa Timur memiliki dinamika politik yang tidak selalu identik dengan daerah lain di Jawa maupun Indonesia. Karena itu, penelitian terhadap elite lokal dapat membantu memperlihatkan variasi dalam proses pembentukan negara. Dekolonisasi dapat memiliki ritme dan bentuk yang berbeda berdasarkan struktur sosial, sejarah pemerintahan, serta konfigurasi elite di masing-masing daerah.

CONCLUSIONS

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, transformasi kekuasaan priyayi-aristokrat di Jawa Timur pada 1950–1963 dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung pada beberapa lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah kelembagaan. Perubahan struktur pemerintahan secara bertahap mengurangi peran lembaga warisan kolonial dan membentuk struktur pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Republik. Lapisan kedua adalah birokrasi. Perubahan tersebut memengaruhi posisi pejabat dan mengharuskan elite lama menyesuaikan diri dengan sistem administrasi negara nasional. Lapisan ketiga adalah legitimasi. Status keturunan dan kedudukan sosial tidak lagi menjadi sumber legitimasi yang memadai. Elite harus memperoleh legitimasi melalui loyalitas kepada Republik, kompetensi administratif, pendidikan, jaringan politik, dan keterlibatan dalam kehidupan politik. Lapisan keempat adalah jaringan kekuasaan. Jaringan keluarga dan sosial lama tidak sepenuhnya hilang, tetapi berinteraksi dengan jaringan baru yang dibangun melalui partai, organisasi, birokrasi, dan kelompok masyarakat.

Keempat lapisan tersebut menunjukkan bahwa perubahan politik lokal merupakan proses yang saling berhubungan. Restrukturisasi lembaga memengaruhi birokrasi; perubahan birokrasi memengaruhi posisi elite; perubahan elite berkaitan dengan sumber legitimasi; dan perubahan legitimasi berhubungan dengan munculnya jaringan politik baru. Oleh karena itu, transformasi kekuasaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu

indikator, seperti pergantian pejabat atau penghapusan lembaga. Periode 1950–1963 dengan demikian merupakan fase penting dalam pembentukan politik lokal Republik. Periode tersebut memperlihatkan bagaimana negara nasional berusaha membangun struktur pemerintahan baru, tetapi pada saat yang sama harus bernegosiasi dengan warisan kelembagaan dan sosial dari masa sebelumnya. Elite priyayi-aristokrat menjadi salah satu kelompok yang berada di pusat proses tersebut. Posisi mereka berubah, tetapi perubahan itu berlangsung melalui proses bertahap dan tidak seragam.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperkuat argumentasi bahwa dekolonisasi di Jawa Timur bukanlah proses pemutusan yang berlangsung secara seketika. Kemerdekaan mengubah sumber kedaulatan dan orientasi politik pemerintahan, tetapi transformasi struktur kekuasaan membutuhkan waktu. Karesidenan dan kawedanan tetap menjadi bagian dari struktur pemerintahan dalam periode tertentu, sementara elite yang sebelumnya memiliki kedudukan penting di dalamnya berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan politik. Ketika restrukturisasi administratif semakin kuat hingga penghapusan kedua struktur tersebut pada 1963, basis kelembagaan kekuasaan elite lokal pun mengalami perubahan yang lebih mendalam.

Dengan demikian, transformasi priyayi-aristokrat di Jawa Timur memperlihatkan karakter dekolonisasi yang bersifat gradual, negosiatif, dan berlapis. Kekuasaan kolonial memang telah berakhir, tetapi warisan institusional dan sosialnya tidak langsung lenyap. Sebaliknya, warisan tersebut dinegosiasikan dalam proses pembentukan negara Republik. Sebagian unsur dipertahankan karena dianggap berguna bagi administrasi negara, sebagian diubah untuk menyesuaikan dengan sistem politik nasional, dan sebagian lainnya dihapus ketika tidak lagi sesuai dengan struktur pemerintahan baru.

Pada akhirnya, proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Republik Indonesia merupakan proses transformasi negara sekaligus transformasi masyarakat politik. Perubahan dari pemerintahan kolonial menuju pemerintahan nasional tidak hanya menyangkut siapa yang memegang kedaulatan, tetapi juga mengenai siapa yang berhak memerintah, dari mana legitimasi kekuasaan diperoleh, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan melalui institusi apa kekuasaan tersebut dijalankan. Dalam konteks Jawa Timur, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat secara konkret melalui

perjalanan priyayi-aristokrat, birokrasi lokal, perubahan struktur administratif, serta munculnya aktor politik baru.

Oleh karena itu, sejarah politik lokal Jawa Timur pada periode 1950–1963 memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai dekolonisasi Indonesia. Ia memperlihatkan bahwa Republik tidak dibangun dengan menghapus seluruh masa lalu, melainkan melalui proses selektif yang menggabungkan kesinambungan dan perubahan. Elite lama tidak seluruhnya menghilang, tetapi harus menegosiasikan kembali posisinya. Institusi kolonial tidak seluruhnya dipertahankan, tetapi secara bertahap ditransformasikan atau dihapus. Sementara itu, aktor politik baru muncul dan menciptakan konfigurasi kekuasaan yang semakin kompleks. Dari proses inilah terbentuk struktur politik lokal Republik yang menjadi fondasi bagi perkembangan pemerintahan daerah pada periode berikutnya.

REFERENCES

ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Abdullah, T. (2024). *Sejarah lokal di Indonesia*. UGM PRESS.

Anderson, D. C. (2013). *Kudeta Madiun 1948*. MediaPressindo.

Arimi, S. (2008). Pergeseran kekuasaan bangsawan jawa indonesia: sebuah analisis wacana kritis. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *10*(2), 1–22.

Cahyaningtyas, P., Djono, D., & Yunianto, T. (2020). Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950-1965. *Candi: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, *20*(2), 54–69.

Compton, B. R. (2021). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton*. LP3ES.

Elson, R. E. (2007). Clifford Geertz, 1926-2006: Meaning, method and Indonesian economic history. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *43*(2), 251–264. https://doi.org/10.1080/00074910701408081

Geertz, C. (2014). Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa,(Terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto). *Jakarta: Komunitas Bambu*.

Gie, S. H. (2005). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Bentang Pustaka.

Ham, O. H. (2018). *Madiun Dalam Kemelut Sejarah*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Ibrahim, J. (2018). *Dinamika sosial dan politik masa revolusi Indonesia*. UGM PRESS.

Kahin, M. T. (1952). Nasionalisme dan Revolusi Indonesia Cetakan pertama. *Depok: Komunitas Bambu*.

MUKAROMAH, A. (2016). *PERAN SOSIAL-POLITIK PRIYAYI MODERN DI SURABAYA PADA TAHUN 1900-1940*. Universitas Airlangga.

Poeze, H. A. (2009). *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 2: Maret 1946-Maret 1947* (Vol. 2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Poeze, H., & Nordholt, H. S. (2023). *Merdeka-Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti (1945-1950)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rivai, A., & Sulistyo, H. (2000). *Palu arit di ladang tebu: sejarah pembantaian massal yang terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Riyanto, F. E. A. (2025). *Dekolonisasi: Filsafat-Metodologis Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, dan Societas "Kita."* PT Kanisius.

Sapto, A. (2012). Nasionalisme Lokal Elite Jawa Timur dalam Krisis Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1948–1950. *Humaniora*, *24*(1), 18–28.

Setiyono, B., & Triyana, B. (2014). *Revolusi Belum Selesai*. Serambi Ilmu Semesta.

Situngkir, C., Silitonga, D. A. B., & Lubis, N. A. P. (2024). Radical and Moderate Currents of the Indonesian National Movement. *Holistic Science*, *4*(1), 124–132.

Toer, P. A., Toer, K. S., & Kamil, E. (1999). *Kronik revolusi Indonesia: 1946* (Vol. 2). Kepustakaan Populer Gramedia.

van Bemmelen, S., & Raben, R. (2011). *Antara daerah dan negara: Indonesia tahun 1950-an*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Van Bruinessen, M. (1994). NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. LKiS Pelangi Aksara.

Visser, L. E., & Marey, A. J. (2008). *Bakti pamong praja Papua di era transisi kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

Wardani, K. D. K. A. (2018). Mimikri dan hibriditas novel Para Priyayi (kajian poskolonial). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *2*(2), 50–61.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Karesidenan dan Kewedanaan tertanggal 25 Oktober 1963